



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

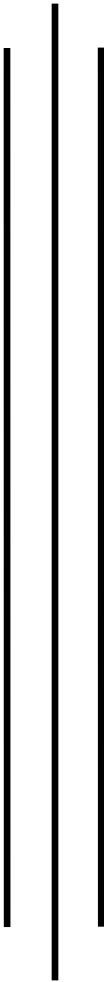
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Agustus 2026
KEPALA DINAS,

Hendriana Gustini, S.Sos., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199009 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... iii
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 (TAHUN BERJALAN) 5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (Tahun Berjalan) 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting 34
4.2 Kaidah Pelaksanaan 34
4.3 Rencana Tindak Lanjut 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II 9

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026
sampai dengan triwulan II 17

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan
Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun
2026 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1356);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1638);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1721);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisiknya sebesar 0%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 24,72% dan realisasi fisiknya sebesar 50%
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 31,56% dan realisasi fisiknya sebesar 50%
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 31,56% dan realisasi fisiknya sebesar 50%
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 40,06% dan realisasi fisiknya sebesar 31,25%
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 12,43% dan realisasi fisiknya sebesar 12,43%

- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pencapaian realisasi keuangan 0% dan realisasi fisiknya 0%
 - b) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisiknya sebesar 0%
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 24,5% dan realisasi fisiknya sebesar 51,28%
 - d) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga persentase realisasi keuangan sebesar 18,07% dan realisasi fisiknya sebesar 18,07%
 - Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - a) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pencapaian realisasi keuangan 0% dan realisasi fisiknya 0%
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 33,78% dan realisasi fisiknya sebesar 0%
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 50,33% dan realisasi fisiknya sebesar 95%
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 63,75% dan realisasi fisiknya sebesar 50%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 79,06% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 62,63% dan realisasi fisiknya sebesar 60%

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 94,94% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pencapaian realisasi keuangan sebesar 88,36% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 87,67% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 62,32% dan realisasi fisiknya sebesar 62,32%
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 85,64% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 54,95% dan realisasi fisiknya sebesar 50%
 - b) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 75,45% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat persentase realisasi keuangan sebesar 92% dan realisasi fisiknya sebesar 90%
- 2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sebagai berikut:
- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan karena pelaksanaan kegiatannya pada akhir triwulan 2 (dua) dan triwulan 3 (Tiga) tahun 2026.
 - 2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan yang masih 0 karena pada saat pembahasan APBD 2026 anggarannya di kurangi.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	94%	91,56%	97,17%
		Nilai SAKIP PD	76,10%	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu	100%	30,46%	30,46%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	50,36%	50,36%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	57,89%	57,89%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	33,33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	30%.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	33,33%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9 Unit	60%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	50%	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	4,98%	4,98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	5 Unit	26,32%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	63 Unit	114,55%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitas			
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM	100%	82,35%	82,35%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar	100%	100%	100%
		Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	100%	100%	100%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditanggulangi Sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100%	13,28 %	13,28 %
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan	1 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Kabupaten/Kota	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	-	-
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	7 Orang	58,33%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	150 Unit	40 Unit	26,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	300 Keluarga	-	-
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung	60 Bangunan	-	-
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	50%	50%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang	180 Orang	72%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	64 Kelurahan	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan daerah adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa baik pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui berbagai layanan yang diberikan.

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam merencanakan 2 (dua) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 Triwulan II, yang capaian realisasi kinerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dari semua indikator mencapai 50%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indikator Kinerja Utama					
	Meningkatnya Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Menit	< 15 Menit	Menit	< 14,41 Menit	
	Meningkatnya Layanan Respon Time Kejadian Kebakaran dan Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase	100%	Presentase	82,35%	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Presentase	94%	Presentase	91,66%	
2	Indikator Kinerja Kunci					
	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Presentase	100%	Presentase	-	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Persentase	94,00%	Persentase	91,56%	
	Nilai SAKIP PD	Persentase	76,10%	Persentase	-	

4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM	Persentase	100%	Persentase	82,35%	
	Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar	Persentase	100%	Persentase	100%	
	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase	100%	Persentase	100%	
5	Indikator SPM					
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100%	Persentase	-	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM	Persentase	100%	Persentase	82,35%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Sumber Daya Manusia

- Belum meratanya kualifikasi personil pemadam dalam penyelamatan;
- Kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda sebagai tenaga operator kendaraan dan pasukan;
- Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan;
- Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan;
- Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada;
- Belum ada jenjang karir berhubungan diklat damkar.

2. Sarana dan Prasarana

- Kurangnya pos-pos Pemadam ditengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak mencapai response time dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
- Kurang meratanya sebaran Pos pemadam kebakaran;
- Masih kurangnya unit pompa kapasitas kecil dan besar;
- Masih kurangnya leaflet/brosur tentang bahaya kebakaran dan pencegahannya;

3. Organisasi dan Manajemen

- Belum tercapainya persentase response time kebakaran kurang dari 15 menit;
- Belum optimalnya peran masing-masing pengemban tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran.

4. Perangkat hukum/peraturan perundang-undangan

- Perwako mengenai Klasifikasi Bahaya Kebakaran;
- Perwako mengenai proteksi bangunan dan gedung;
- Perwako mengenai Persyaratan Penentuan Jenis, Data Padam, Jumlah dan Penempatan Alat Pemadam Api;
- Perwako mengenai Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran;
- Perwako mengenai Persyaratan Teknis Pencegahan dan Penanganan Insiden Bahan Berbahaya.

B. Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Sesuai petunjuk dan pelaksanaan serta dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan system kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam.
2. Sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

b. Kelemahan (weaknesses)

1. Dengan luas geografis daratan Kota Batam 1.034 Km² dan ada 12 kecamatan sangat tidak ideal dengan hanya ada 3 (tiga) pos Pemko Batam dan 6 (enam) pos Damkar BP Batam.
2. Kebutuhan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang ada baru terpenuhi 35,3 % dari pedoman penghitungan kota Batam sebanyak 269 saat ini personil baru terpenuhi 95 personil.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana guna pendukung dalam pelaksanaan tugas serta kebutuhan administratif.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Kemajuan teknologi menuntut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam untuk terus menginovasi sumber daya yang ada baik personil maupun peralatan serta unit kendaraan yang memadai
- b. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan di Batam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam juga terus mempersiapkan diri, intensitas kebutuhan pemadam dan penyelamatan yang setiap waktu terus bertambah
- c. Memenuhi segala kebutuhan yang ada, persoalan anggaran menjadi tantangan sendiri di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Batam.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yaitu:

- a. Sinergitas lintas OPD dan Masyarakat Kota Batam sangat tinggi hingga memudahkan pelaksanaan tugas dan pelayanan di Kota Batam
- b. Melalui pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan oleh pusat dan daerah masing masing personil serta pegawai dilingkungan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya
- c. Sebagai daerah industri Kota Batam, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam memiliki peluang dan kesempatan yang strategis dalam melakukan pelayanan di berbagai perusahaan untuk terus meningkatkan keamanan dan sistem serta fungsi alat proteksi kebakaran guna menekankan angka kecelakaan dan kebakaran di daerah industri.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam antara lain:

1. Sesuai kebutuhan, luas wilayah Kota Batam 1.034 Km² serta pemerataan pembangunan yang cukup pesat Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam selayaknya menambah 12 pos pemadam kebakaran dari 3 yang tersedia saat ini dengan kekuatan personil 95 personil yang dibutuhkan sebanyak 269 personel agar terlaksananya tugas dan pelayanan terhadap masyarakat dikota batam
2. Letak geografis Kota Batam yang berada pada lintas selat malaka serta iklim pesisir dengan berbagai potensi bencana yang dapat timbul diantaranya curah hujan yang tinggi pada waktu tertentu, angin besar, banjir besar serta longsor yang menjadi tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan saat bencana tersebut terjadi
3. Ancaman bahaya kebakaran yang menyebabkan korban jiwa serta harta dan benda mengancam warga setiap saat yang menjadi tanggung jawab besar Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam
4. Dalam melaksakan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat yang kian meningkat setiap tahun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam juga dihadapkan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar agar terlaksanya tugas pokok dan fungsi yang diharapkan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rp6.976.600,00 mengalami perubahan adanya penambahan menjadi Rp7.535.600,00
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu Rp15.151.395.497,00 mengalami perubahan adanya pengurangan menjadi Rp14.038.681.246,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu Rp38.780.000,00 mengalami perubahan adanya pengurangan menjadi Rp34.580.000,00
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Rp17.449.000,00 mengalami perubahan adanya pengurangan menjadi Rp12.414.500,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Rp75.494.800,00 mengalami perubahan adanya penambahan menjadi Rp78.069.100,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Rp163.625.000,00 mengalami perubahan adanya pengurangan menjadi Rp49.583.000,00
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp112.855.000,00 menjadi Rp104.795.000,00
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp40.280.000,00 menjadi Rp75.739.000,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan adanya penambahan yaitu Rp731.135.000,00 menjadi Rp753.659.000,00
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp37.740.000,00 menjadi Rp34.740.000,00

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp571.076.600,00 menjadi Rp496.372.600,00
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu Rp0,00 mengalami perubahan adanya penambahan menjadi Rp500.000.000,00 di karenakan kondisi kendaraan sudah sering rusak.
 - b. Kegiatan Pengadaan Mebel yaitu Rp38.338.300,00 mengalami perubahan adanya pengurangan menjadi Rp27,501,400.00
 - c. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Rp132.712.500,00 mengalami perubahan adanya pengurangan menjadi Rp105,572,300.00
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp186.457.000.00 menjadi Rp0,00
 - b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp135.686.400.00 menjadi Rp88.239.000,00
 - c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp116.259.900,00 menjadi Rp57.879.800,00
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp215.670.000,00 menjadi Rp100.156.000,00
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp26.735.191.300,00 menjadi Rp290.931.700,00
 - f. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp216.019.000,00 menjadi Rp195.302.300,00
 - Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp17,545,000.00 menjadi Rp0,00
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat mengalami perubahan adanya penambahan yaitu Rp128,143,000.00 menjadi Rp269,046,700.00

Tabel 3.1

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	94.00	94.00	Rp17.462.295.017,00	Rp16.481.357.466,00	-Rp980,937,551,00	
			Nilai Sakip PD (Dengan Satuan : Poin)	Nilai Sakip PD (Dengan Satuan : Poin)	76.10	76.10				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai dengan Tahapan dan Waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100%	100%	Rp6.976.600,00	Rp7.535.600,00	-Rp559.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp6.976.600,00	Rp7.535.600,00	-Rp559.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pegawai yang Menerima	Persentase Pegawai yang Menerima	100%	100%	Rp15.190.175.497,00	Rp14.073.261.246,00	-Rp1,116,914,251,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	Daerah	Daerah	Layanan Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	Rp15.151.395.497,00	Rp14.038.681.246,00	- Rp1.112.714.251,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp38.780.000,00	Rp34.580.000,00	- Rp4.200.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	Rp369.423.800,00	Rp244.861.600,00	- Rp124.562.200,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	Rp17.449.000,00	Rp12.414.500,00	- Rp5.034.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	Rp75.494.800,00	Rp78.069.100,00	Rp2.574.300,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	1 Paket	Rp163.625.000,00	Rp49.583.000,00	- Rp114.042.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penggandaan	Penggandaan	yang Disediakan	Penggandaan yang Disediakan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp112.855.000 ,00	Rp104.795.000 ,00	- Rp8.060.000,0 0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	Rp171.050.800 ,00	Rp633.073.700 ,00	Rp462,022,90 0,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	-	Rp500.000.000 ,00	Rp500.000.00 0,00	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	Rp38.338.300, 00	Rp27,501,400. 00	- Rp10.836.900, 00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9 Unit	Rp132.712.500 ,00	Rp105,572,300 .00	- Rp27.140.200, 00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	100%	Rp344.436.720,00	Rp344.436.720,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp201.150.000,00	Rp201.150.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp143.286.720,00	Rp143.286.720,00	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	Rp1.380.231.600,00	Rp1.178.188.600,00	- Rp202,043,00 0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan	1 Unit	1 Unit	Rp40.280.000,00	Rp81.739.000,00	Rp41,459,000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	12 Unit	Rp731.135.000,00	Rp565.337.000,00	- Rp165,798,000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	51 Unit	Rp37.740.000,00	Rp34.740.000,00	- Rp3.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DiRehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DiRehabilitasi	4 Unit	1 Unit	Rp571.076.600,00	Rp496.372.600,00	- Rp74.704.000,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Persentase Pelayanan, Pengendalian, Penyelamatan Korban Kebakaran yang Terlaksana Sesuai dengan	Persentase Pelayanan, Pengendalian, Penyelamatan Korban Kebakaran yang	100 %	100 %	Rp27.854.637.600,00	Rp1.105.221.500,00	- Rp26.749.416.100,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SPM	Terlaksana Sesuai dengan SPM						
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri Yang Tersedia	Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri Yang Tersedia	100 %	100 %				
			Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	100 %	100 %				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditanggulangi Sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditanggulangi Sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100 %	100 %	Rp27.605.283.600,00	Rp732.508.800,00	- Rp26.872.774.800,00	
	Pencegahan Kebakaran	Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Rp186.457.000,00	Rp0,00	- Rp186.457,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	NSPM Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a Setiap Tahunnya					0,00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	12 Laporan	12 Laporan	Rp135.686.400 ,00	Rp88.239.000, 00	- Rp47.447.400, 00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Ev akuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga n Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp116.259.900 ,00	Rp57.879.800, 00	- Rp58.380.100, 00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran	12 Orang	7 Orang	Rp215.670.000,00	Rp100.156.000,00	- Rp115.514.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	150 Unit	108 Unit	Rp26.735.191.300,00	Rp290.931.700,00	- Rp26.444.259.600,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran	300 Keluarga	300 Keluarga	Rp216.019.000,00	Rp195.302.300,00	-Rp20.716.700,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
				Rumah Tangga						
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan /Gedung	Jumlah Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan /Gedung	60 Bangunan	-	Rp17.545.000,00	-	- Rp17.545.000,00	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan Dokumen)	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan Dokumen)	1 Dokumen	-	Rp17.545.000,00	-	- Rp17.545.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	Rp231.809.000,00	Rp372.712.700,00	Rp140.903.700,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	395 Orang	415 Orang	Rp128.143.000,00	Rp269.046.700,00	Rp140.903.700,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Kebakaran						
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya	64 Desa/Kel urahan	64 Desa/Kel urahan	Rp103.666.000	Rp103.666.000	-	
							Rp45.316.932.617,00	Rp17.586.578.966,00	-Rp27,730,353,651,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD